

ABSTRAK

Kecamatan Banyubiru merupakan kecamatan yang paling sering mengalami kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang. Faktor kondisi lereng yang terjal pada beberapa wilayah pada kecamatan ini cukup berbahaya untuk dijadikan sebagai kawasan hunian maupun industri dan perdagangan karena tingginya kemungkinan terjadinya bencana terutama tanah longsor. Penelitian ini berfokus pada identifikasi daerah ancaman tanah longsor khususnya pada kawasan terbangun di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Pembuatan peta ancaman tanah longsor mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2007. Metode yang digunakan dalam identifikasi wilayah ancaman bencana tanah longsor berupa skoring dan pembobotan dengan menggunakan beberapa parameter yaitu kemiringan lereng, penggunaan lahan, jenis batuan, curah hujan, dan jenis tanah. Berdasarkan pengolahan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pemetaan dengan menggunakan parameter rata-rata curah hujan bulanan selama tiga bulan lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan curah hujan tahunan. Ancaman bencana tanah longsor pada kawasan terbangun di Kecamatan Banyubiru terbagi menjadi tiga tingkat dengan dominasi tingkat ancaman bencana tanah longsor sedang seluas 69% atau sekitar 275,70 Ha. Hasil validasi menunjukkan bahwa dari 55 kejadian bencana tanah longsor di Kecamatan Banyubiru, 17 kejadian terjadi di kawasan terbangun dengan tingkat ancaman bencana sedang hingga tinggi.

Kata Kunci: Ancaman, Tanah Longsor, Kawasan Terbangun, Sistem Informasi Geografis

ABSTRACT

Banyubiru Sub-District is the sub-district that experienced the most landslides in Semarang Regency. The condition of steep slopes in several areas in this sub-district is quite dangerous to be used as a residential, industrial and commercial area because of the high probability of disasters, especially landslides. This research focuses on identifying landslide hazard areas, especially on built-up areas in Banyubiru Sub-District, Semarang Regency. The production of landslide hazard map refers to Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007. The method used to identify landslide hazard areas is scoring and weighting using several parameters, namely slope, land cover, rock type, rainfall and soil type. Based on the processing, it can be known that mapping using the average monthly rainfall parameter for three months is more accurate than using annual rainfall. Landslide hazard on built-up areas in Banyubiru Sub-district is divided into three levels with the dominance of medium landslide hazard level covering 69% or approximately 275.70 Ha. The validation results show that out of 55 landslide events in Banyubiru Sub-district, 17 events occurred on built-up areas with medium to high hazard levels.

Keywords: Hazard, Landslide, Built-Up Areas, Geographic Information System